

**PENGUATAN FUNGSI KOORDINASI DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI KOTA BEKASI**

JURNAL

**Diajukan dalam rangka Memenuhi Syarat Kelulusan
Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.AP.)
Pada Konsentrasi Kebijakann Publik
Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik
Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung**

Oleh :

**Nur Faizah
NPM :208010043**



**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM MAGISTER ILMU
ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

PENGUATAN FUNGSI KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA BEKASI

**Nur Faizah
NPM :208010043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS
PASUNDAN**

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum berjalan secara efektif. belum efektifnyanya fungsi koordinasi tersebut di atas, akan dikaji berdasarkan pendekatan teoritik dari Thamrin, (2021) meliputi 4 (empat) tipe yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

Hasil penelitian ini telah mengungkap bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum berjalan secara efektif. Hal ini mencerminkan bahwa kordonasi yang dilaksanakan oleh pimpinan selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan organisasi, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan penanggulangan bencana daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Terdapat faktor–faktor penghambat pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di BPDB Kota Bekasi dilihat dari kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Tipe kesatuan tindakan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bekasi, Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Tipe pembagian kerja menunjukkan bahwa kesadaran organisasi terhadap pekerjaanya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum efektif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan pada tipe disiplin yang dijalankan oleh BPBD Kota Bekasi sudah berjalan baik

ABSTRACT

The main problem in this study is that the implementation of the coordination function in regional disaster management at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency has not been running effectively. the ineffectiveness of the coordination function mentioned above, will be studied based on a theoretical approach from Thamrin, (2021) covering 4 (four) types, namely unitary action, communication, division of labor and discipline.

The results of this study have revealed that the implementation of the coordination function in regional disaster management at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency has not been running effectively. This reflects that the coordination carried out by the leadership so far has not fully gone according to the expectations of the organization, so that it has implications for the implementation of regional disaster management by the Bekasi City Regional Disaster Management Agency.

There are factors inhibiting the implementation of coordination in regional disaster management at BPDB Kota Bekasi seen from the unity of action, communication, division of

labor and discipline. The type of unitary action shows that there are still irregularities in the work carried out by the Bekasi City BPBD. In the communication patterns carried out across regional apparatus organizations, it has been going well with intense communication. The type of division of labor shows that organizational awareness of their work has not gone well, it has been proven that the BPBD as the coordinator has not been effective in socializing the disaster response area to the public and the type of discipline carried out by the Bekasi City BPBD has gone well.

I. Pendahuluan

Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung dan gelombang pasang merupakan jenis bencana yang dominan di Indonesia. Bencana hidrometeorologi terjadi rata-rata hampir 70% dari total bencana di Indonesia. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan bertambahnya jumlah penduduk makin memperbesar ancaman risiko bencana. Bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar. Apabila ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintasi wilayah penduduk padat. Lebih dari 220 juta penduduk, sebagian adalah miskin dan tinggal di daerah rawan banjir. Pada umumnya bencana banjir tersebut terjadi di wilayah Indonesia bagian barat seperti wilayah Jawa Barat yang memiliki curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian Timur. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang jumlah

penduduknya terbesar di Indonesia (18% dari total penduduk di Indonesia) tersebar di 26 kabupaten/kota, sehingga membawa konsekuensi yang besar apabila terjadi bencana, baik korban jiwa maupun harta benda.

Secara khusus untuk bencana banjir di Kota Bekasi koordinasi yang dilakukan yaitu Sektor Sosial (Dinas Sosial), Sektor Kesehatan (Dinas Kesehatan), Sektor Energi dan Sumber Daya Air (Dinas SDA), Sektor Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga PU). Sektor Kebersihan (Dinas Kebersihan), Polresta, dan Kodim.

Koordinasi antar instansi yang terjadi saat ini pada penanggulangan banjir Kota Bekasi, menurut data yang dikumpulkan, menunjukkan indikasi masalah di antaranya, **Pertama**, belum adanya sinergitas dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihan secara menyeluruh dalam hal proses penanggulangan bencana banjir Kota Bekasi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dengan SKPD/instansi

sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya pencapaian sasaran dalam penanggulangan banjir Kota Bekasi.

Kedua, pembagian kerja di antara intansi-intansi anggota koordinasi belum teralokasikan dengan baik, ini terjadi pada tahap pencegahan saat terjadi potensi bencana yaitu pada kegiatan mitigasi, seperti kegiatan pengerukan sungai, pembuatan bronjong, pengelolaan sumber air, ataupun pembuatan tanggul. Pada kegiatan ini terlalu banyak pihak yang terlibat, yang memiliki kewenangan sama dalam tahapan ini sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan pada kegiatan mitigasi.

Ketiga, kurangnya pemahaman para anggota koordinasi atas ketentuan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat seperti yang diatur dalam standar kebutuhan pangan (Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bencana. Ini terlihat dari kualitas serta kuantitas kebutuhan dasar pada saat pengungsian masih kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga.

Keempat, kurang optimalnya fungsi komando dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi pada saat pemberian komando/perintah serta pada saat memonitor kegiatan tanggap darurat penanggulangan banjir Kota Bekasi.

Menurut data yang ada, pada pendistribusian bahan-bahan sandang, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi dan Dinas Sosial masih saling mengandalkan pada saat pendistribusian sandang ini. Hal ini mengakibatkan kebutuhan warga korban banjir akan sandang menjadi terhambat. Selain itu dengan adanya ketidak sigapan komando di lapangan turut mempengaruhi Pertolongan pertama saat banjir masih dilakukan kurang tepat dan cepat.

Kelima, pengkomunikasian oleh koordinator belum berjalan dengan baik terutama dalam kegiatan penanggulangan bencana pada proses pemulihan/rehabilitasi. Masih adanya permasalahan dalam pemulihan dampak lingkungan dan pemulihan kesehatan. Terdapat ketidaksesuaian bantuan prioritas untuk kelompok rentan (warga yang sakit/ lanjut usia & balita). Sebagian masyarakat korban banjir yang telah mengungsi contohnya saja di Aula Serbaguna, mengeluhkan penyakit demam dan diare, bahkan ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) terutama kalangan anak-anak. Namun tindakan yang diberikan oleh Intansi pemberi pelayanan kesehatan dirasa belum memenuhi kebutuhan warga.

Masalah tersebut di atas, diduga disebabkan oleh fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Bekasi yang belum berjalan secara efektif. Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : **Penguatan Fungsi Koordinasi Dalam Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada Penguatan Fungsi Koordinasi Dalam Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dimana dalam prakteknya koordinasi tersebut belum berjalan secara efektif. Sedangkan sub fokusnya adalah bahwa belum efektifnyanya Koordinasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tersebut di atas, akan dikaji berdasarkan pendekatan teoritik dari Thamrin, (2021) meliputi 4 (empat) tipe yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi?

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum berjalan secara efektif ?
2. Bagaimana penguatan koordinasi agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat berjalan efektif ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah yang belum efektif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
3. Mengkaji dan menganalisis penguatan koordinasi agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat berjalan efektif ?

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Guna teoritis, dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik khususnya berkaitan dengan fungsi koordinasi.

2. Guna praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya efektifkan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

2. KAJIAN PUSTAKA KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI

1. Kajian Pustaka

a. Konsep Ilmu Administrasi Publik

Administrasi dan manajemen dalam suatu organisasi harus bergerak ditempat yang serba terbatas, oleh karena itu, administrasi memiliki arti yang sangat luas. Definsi administrasi menurut Siagian (2007:3) yaitu “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Atmosudirdjo (2003:46) menyebutkan bahwa “administrasi adalah penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya”. Sedangkan pendapat dari Simon dalam Handyaningrat (2006:3) yaitu “*Administration as the activities of group cooperating to accomplish common goals*”. Sedangkan pendapat White (1968:11) yaitu “*Administration is a*

process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale etc”.

Fungsi administrasi dan manajemen menurut Siagian (2007:103) yaitu “Fungsi-fungsi organik” dan “Fungsi-fungsi pelengkap”. Keduanya memiliki kesamaan kepentingan dan saling mendukung dalam aktivitas kerja secara operasional.

Fungsi organik yaitu seluruh fungsi yang mutlak harus dijalankan administrasi dan manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi organik akan mengakibatkan kematian organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pelengkap adalah fungsi yang walaupun tidak mutlak harus ada, tetapi sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan secara efektif dan efisien.

Fungsi organik tersebut merupakan fungsi pelengkap ini meliputi sistem kerja, prosedur kerja dan tata kerja. Definisi ketiga unsur tersebut menurut LAN-RI (2009:247) yaitu :

1. Sistem kerja adalah rangkaian pekerjaan yang meliputi langkah-langkah pekerjaan yang meliputi langkah-langkah pekerjaan yang berkaitan dalam bentuk prosedur kerja dan tata kerja secara tertib dan teratur.
2. Prosedur kerja adalah urutan langkah-langkah pekerjaan keterampilan yang berkaitan satu sama lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang pekerjaan yang membentuk cara-cara pencapaian tujuan secara bertahap dari suatu kegiatan.

3. Tata kerja adalah pekerjaan yang berkaitan satu sama lain sehingga adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas.

Sistem, prosedur dan tata kerja tersebut di atas merupakan unsur yang sangat penting dalam rangkaian kerja untuk menyelesaikan tujuan sesuai bidang tugasnya. Administrasi merupakan kegiatan yang sangat luas dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dikemukakan Soedjadi (2004:17) yaitu :

Penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi harus menjadi satu kesatuan dengan penyelenggara manajemen. Penyelenggara administrasi sering disebut dengan administrator dan penyelenggara manajemen sering disebut manajer. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena administrasi memiliki peran sebagai proses dan manajemen memiliki peran sebagai alat yang harus bergerak dalam satu wadah yaitu organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi memiliki tugas yang sangat luas. Karena harus bergerak dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan proses kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu tugas yang sangat penting dengan menentukan terhadap keberhasilan dengan mencapai tujuan. Proses kerja yang harus dilakukan setiap organisasi menjadi berbagai bentuk kegiatan, sebagaimana menurut Tjokroamidjojo (2006:16) yaitu “Ditinjau

dari segi perkembangan, administrasi dapat bagi atas dua bagian besar, yaitu :

- (1) Administrasi negara (*Public Administration*) dan (2) Administrasi niaga (*Bussiness Administration*)”. Secara khusus, administrasi negara terbagi ke dalam tiga unsur besar sebagaimana dikemukakan Tjokroamidjojo (2006:19) yaitu :

Unsur administrasi negara adalah (a) Administrasi Keuangan, (b) Administrasi Kepegawaian, (c) Administrasi Material dan ketiga unsur administrasi tersebut memiliki tugas yang sama yaitu bertugas untuk mendapatkan, menggunakan dan mengendalikan.

Administrasi publik (*public administration*) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintah. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Peranan administrasi negara dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan politik serta mewujudkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat, melalui

kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pemerintah memerlukan administrasi negara yang berdaya guna dan berhasil guna. Peran administrasi negara atau administrasi publik merupakan proses dalam perumusan kebijakan sebagaimana pendapat Nigro dan Nigro (1977:18) yaitu *"Public Administration has an important role formulating of public policy and thus a part of the political process"*. Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik).

Pfiffner dan Presthus (1975:3) mengatakan bahwa administrasi negara mempunyai arti :

Public administration may be defines as the art and science of design and carrying out public policy. As the scale and complex of government uncreased, civil sevants assumed a large role in policy making, in addition to their traditional and still mayor role of implementing polities designed by the elected master.

Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan mendesain dan melaksanakan kebijakan publik. Skala dan kompleksitas dari urusan pemerintah yang semakin bertambah, asumsi pelayanan sipil merupakan pengaturan yang besar dalam pembuatan kebijakan, peran dari implementasi kebijakan untuk melengkapi

kebiasaan yang didesain melalui pilihan mereka.

b. **Konsep Koordinasi**

Secara harfiah, istilah koordinasi menurut Westra (1982) "berasal dari kata asing, yaitu *"cum"* yang artinya berbeda-beda, dan *'ordinare'* yang artinya penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya". Terkait dengan konsep koordinasi, Stoner, et.al (1996:12) mengemukakan bahwa "koordinasi merupakan penyeimbang dari prinsip spesialisasi atau pembagian pekerjaan". Sementara spesialisasi sendiri sesungguhnya merupakan kumpulan aktivitas yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Kemudian koordinasi mencakup upaya menyatukan dan mengatur orang-orang untuk memastikan bahwa hubungan pekerjaan antara orang yang berbeda tetapi berkaitan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi secara efektif.

Koordinasi bertujuan untuk mengarahkan agar tujuan organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Lebih jauh koordinasi menurut Syafrudin (1993:286) adalah :

Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai

suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa koordinasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menciptakan kesatuan tindakan agar terjadi keselarasan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Siagian (1994:110) mengatakan bahwa : “Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula”. Definisi koordinasi menurut Farland (1979:186) adalah : “*Coordination is the process whereby an executive develops an orderly patterns of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose*”. Artinya koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Pendapat para pakar tersebut mencirikan bahwa koordinasi itu sebagai suatu pengaturan dan sebagai suatu proses dalam mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur dalam menciptakan kesatuan tindakan. Selanjutnya Farland (1979:186)

menetapkan ciri-ciri koordinasi sebagai berikut :

Pertama, bahwa tanggung jawab daripada koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah merupakan tugas dari pimpinan.

Kedua, adanya proses (*continues process*). Sebab koordinasi adalah pekerjaan daripada pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

Ketiga, pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu.

Keempat kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Kelima, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan daripada usaha untuk meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok, di mana mereka bekerja.

Pembagian pekerjaan melalui koordinasi dari berbagai orang atau unit kerja dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefektif mungkin. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (1996:86) bahwa : “Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling

mengisi, saling membantu dan saling melengkapi". Ndraha (2003:530) mendefinisikan bahwa :

Koordinasi sebagai suatu proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain supaya keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lain.

Pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa koordinasi merupakan usaha kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Sugandha (2006:25) mengatakan bahwa ada tiga jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya yaitu :

- a. Menurut lingkungannya, terdapat :
 - 1) Koordinasi intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
 - 2) Koordinasi ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- b. Menurut arahnya terdapat :
 - 1) Koordinasi horisontal yaitu

2. Kerangka Pemikiran

Mencapai tujuan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, seringkali dibagi menjadi unit-unit yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga perbedaan

koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari

- 2) organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
- 3) Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
- 4) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya.
- 5) Koordinat fungsional, adalah koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

c. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 1988 :

- 1) Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
- 2) Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
- 3) Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu

tersebut menimbulkan spesialisasi dalam pekerjaan. Namun agar tujuan utama dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka diperlukan koordinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugandha (2006:12-13) yang menyatakan bahwa :

Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.

Pendapat tersebut di atas bahwa koordinasi merupakan kesatupaduan gerak pada unit-unit yang berbeda dalam suatu organisasi agar pekerjaan mengarah kepada sasaran pencapaian tujuan. Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie (2000:15) mengatakan bahwa :

Koordinasi adalah kegiatan menghubungkan-orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta tercegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran, dan kekosongan tindakan.

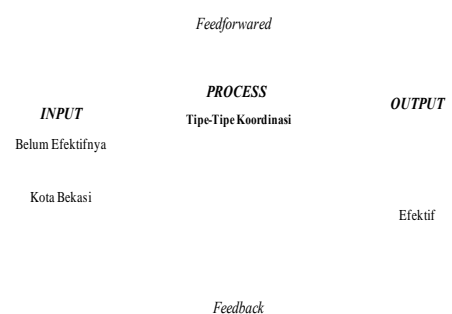
Pengertian di atas tersebut menjelaskan koordinasi mempunyai ciri-ciri yaitu, Koordinasi merupakan tanggung jawab pimpinan, adanya proses yang kontinyu, pengaturan secara teratur dari usaha kelompok, konsep kesatuan tindakan dan tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Mooney dalam Sutarto (2000:141) berpendapat bahwa : *“Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose”*. Artinya

koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Unsur-unsur koordinasi seperti yang disebutkan di atas menurut pemikiran peneliti bahwa koordinasi merupakan hal yang penting dalam organaisasi dengan tujuan agar terjadi keselarasan dan kesatupaduan gerak kegiatan sehingga tujuan organaisasi dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan koordinasi baik ke dalam maupun keluar organisasi menurut Thamrin (2021:24) terdiri dari beberapa tipe yaitu

1. Kesatuan tindakan
2. Komunikasi
3. Pembagian kerja
4. Disiplin

Dipilihnya teori koordinasi dari Thamrin (2021) karena parameternya sesuai dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada paradigma pemikiran penelitian di bawah ini.



3. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas peneliti merumuskan proposisi penelitian adalah :

1. Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum efektif.
2. Terdapat faktor–faktor hambatan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dilihat dari kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin
3. Penguatan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat berjalan efektif.dengan mempertimbangkan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

4. Pembahasan Hasil Penelitian Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum efektif.

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB)

Kota Bekasi yang belum efektif, merupakan rangkaian upaya yang meliputi tiga tahapan, yaitu sebelum bencana, tanggap darurat, dan setelah bencana. Tujuan dalam penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu dengan baik. Dalam tahap pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bekasi, BPDB merupakan instansi yang mempunyai tugas dan peran penanggulangan bencana di daerah serta berperan sebagai lembaga koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana terkait.

Tuntutan perubahan yang dihadapi BPDB Kota Bekasi adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentu saja harus didukung oleh adanya reformasi dalam tataran birokrasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut, tiada lain untuk mengantisipasi berbagai tantangan internal dan eksternal yang dirasakan kian kompleks seiring dengan perubahan perkembangan global.

Untuk mengefektifkan penanggulangan bencana di daerah, melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) baik di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Sebab

itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bekasi adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, bahwa:

Dalam penanganan bencana BPDB lebih dulu karena terkait dengan evakuasi. Namun, dalam penanganan banjir misalnya, DBMSDA akan turun, seperti penanganan bencana tanggul jebol atau tidak sehingga penyediaan perangkat bencana seperti kebutuhan pompa kita sediakan. Intinya SDA dan BPDB dalam penanganan bencana di Kota Bekasi selalu siap kerjasama.

Kompleksnya bencana tidak saja dalam penanganan banjir tetap membutuhkan koordinasi yang terpadu dari berbagai instansi pemerintah. Sebelum terbentuknya BNPB pusat, berdasarkan Kepres Nomot 3 Tahun 2001 penanganan mengenai banjir ini dilakukan oleh Satkorlak (Satuan Kordinasi pelaksana) penanggulangan bencana tingkat provinsi serta Satlak (satuan pelaksana) Kota Bekasi. Namun saat ini sejak terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bekasi yang memiliki

kewenangan serta legalitas khusus dalam hal kebencanaan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bekasi dengan Intansi Terkait diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB). Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) melakukan koordinasi dengan intansi/lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu di dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana dinyatakan pula bahwa untuk menanggulangi bencana dilakukan koordinasi eksternal antar instansi terkait dalam beberapa sektor yaitu sektor pemerintahan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, energi dan sumber daya air, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, keuangan kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, Polri dan TNI.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang belum efektif, maka koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Bekasi mempunyai sasaran yang sangat penting karena dapat mengarahkan semua tindakan serta memberikan sumbangan kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan, sehingga dengan koordinasi, manajemen suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah kegiatan manajemen, sekaligus melahirkan jaringan hubungan kerja yang diperlukan.

Menurut Kasi Sub Koordinator Bidang Surveilans Dinas Kesehatan Kota Bekasi, bahwa;

Untuk Dinkes khususnya dibidang survilent menindaklanjuti akibat dari bencana, Dinkes khusus melihat situasi apakah ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian misal ibu hamil, bayi anak-anak, lansia dll. Untuk penanganan dan pengobatannya ada dibidang Yankes. Untuk survilent lebih kependataan dengan RCA (rapid assesment aplikasinya). Sampai dengan saat ini kita selalu komunikasi dengan baik dengan BPDB, jika ada banjir kita selalu mendapat informasi untuk pelatihan bencana saat ini baru di Puskesmas untk Dinkes sendiri saat ini belum ada.

Hasil analisis lapangan pada pelaksanaan fungsi koordinasi dalam

penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang belum efektif, terdapat tiga tahapan dalam penanggulangan bencana beserta dengan kewenangannya yaitu, pada pra bencana maka fungsi BPDB bersifat koordinasi dan pelaksana, pada saat darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana serta pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana. Kegiatan pencegahan bencana/pra bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Dalam tahapan pra bencana terdiri dari kegiatan pencegahan pada saat terjadi potensi bencana yaitu kesiapsiagaan & mitigasi, dan pada saat tidak terjadi potensi bencana yaitu pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada saat terjadinya bencana, dilakukan kegiatan Tanggap darurat bencana yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Sedangkan khusus untuk bencana banjir Kota Bekasi Koordinasi yang dilakukan yaitu Sektor Sosial (Dinas Sosial Kota Bekasi), Sektor Kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Bekasi), Sektor Sumber Daya Air (Dinas DBMSDA Kota Bekasi), Sektor Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga Kota Bekasi). Sektor Kebersihan (Dinas Kebersihan Kota Bekasi), Polres Kota Bekasi, dan Kodim 0507.

Dalam mengimplementasikan sikap dan tanggap darurat, Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinsos Kota Bekasi mengatakan, bahwa;

Dinas Sosial dalam hal penanganan pasca bencana mem-*backup* jika diperlukan tenaga. Sedangkan BPDB sudah maksimal untuk pengarahan anggota jika dirasakan kurang dan kemudian Dinsos mengarahkan Tagana. Sementara Dinsos dibidang sosial menyiapkan makanan, penyediaan tenda pengungsi, dan khusus untuk korban yang mengalami stres dinsos mengirim anggota yang

menangani bidang Psikologi untuk tindaklanjutnya, sehingga korban tidak merasa stres, dalam masa tanggap darurat biasanya maksimal 7 hari Dinsos memberikan kebutuhan jasmani dan rohani.

Untuk penanganan bencana ini, lanjut Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinsos Kota Bekasi;

Dalam penanganan bencana Kota Bekasi sudah dilakukan satu komando, penanggung jawab di Kepala Dinas, kemudian turun ke Kabid dan turun ke bidang sosial tidak ada yang saling mengandalkan dalam pelaksanaannya. Dinsos dalam hal penanganan pasca bencana penyediaan dalam hal makanan, sandang, tenaga visi dan sosial. Juga ada tagana (taruna siaga bencana) terdiri dari 50 orang merupakan relawan Dinsos, untuk Tagana Dinsos menyediakan peningkatan sumber daya manusia sarannya untuk memudahkan dalam hal penanganannya.

Koordinasi antar instansi yang terjadi saat ini pada penanggulangan banjir Kota Bekasi, menurut data yang dikumpulkan, menunjukkan indikasi masalah di antaranya, Pertama, belum adanya sinergitas dalam kegiatan

sosialisasi serta pelatihan secara menyeluruh dalam hal proses penanggulangan bencana Kota Bekasi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) bersama dengan SKPD/instansi sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana di Kota Bekasi.

Kedua, pembagian kerja di antara instansi-instansi anggota koordinasi belum teralokasikan dengan baik, ini terjadi pada tahap pencegahan saat terjadi potensi bencana yaitu pada kegiatan mitigasi, seperti kegiatan pengerukan sungai, pembuatan bronjong, pengelolaan sumber air, ataupun pembuatan tanggul. Pada kegiatan ini terlalu banyak pihak yang terlibat, yang memiliki kewenangan sama dalam tahapan ini sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan pada kegiatan mitigasi.

Ketiga, kurangnya pemahaman para anggota koordinasi atas ketentuan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat seperti yang diatur dalam standar kebutuhan pangan (Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bencana. Ini terlihat dari kualitas serta kuantitas kebutuhan dasar pada saat pengungsian masih kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga.

Keempat, kurang optimalnya fungsi komando dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bekasi pada saat pemberian komando/perintah serta pada saat memonitor kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana Kota Bekasi. Kelima, pengkomunikasian oleh Koordinator belum berjalan dengan baik terutama dalam kegiatan penanggulangan bencana pada proses pemulihan/rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pencapaian tujuan penanggulangan bencana di Kota Bekasi belum didukung oleh koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Bekasi. Kendala yang dialami dalam proses penanggulangan bencana di Kota Bekasi adalah karena belum adanya kesamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Instansi terkait koordinasi masih belum dapat beradaptasi maksimal dengan peran BPDB sebagai koordinator dan pada pelaksanaannya instansi terkait masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan. Kesadaran antara instansi terkait dengan koordinator untuk bersinergi dalam kegiatan penanggulangan bencana masih belum didukung oleh

prinsip-prinsip penanggulangan bencana, terutama dalam tahapan tanggap darurat.

Peran BPDB (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) BPDB sebagai koordinator belum berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi komando yang dimiliki BPDB belum berjalan dengan optimal, ini terlihat tidak adanya ketegasan dari koordinator dalam mengarahkan kegiatan dalam penanggulangan bencana. Spesialisasi pekerjaan belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi pekerjaan selain itu pertanggung jawaban pun masih parsial sifatnya. Para instansi anggota koordinasi masih sulit beradaptasi dengan peran BPDB selaku koordinator. Salah satunya penyebabnya adalah karena fungsi *ex officio* sering dilimpahkan kepada kepala pelaksana. Hal ini menyebabkan sulit terciptanya ketegasan dari koordinator kepada instansi-intansi pemerintah anggota koordinasi yang sangat rentan akan tingginya ego sektoral masing-masing instansi. Dengan belum optimalnya fungsi BPDB maka tujuan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif, terpadu dan akuntabel belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan

secara komprehensif pada Bab IV, maka peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini telah mengungkap bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum berjalan secara efektif. Hal ini mencerminkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh pimpinan selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan organisasi, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan penanggulangan bencana daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
2. Terdapat faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dilihat dari kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Di lihat dari kesatuan tindakan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan

baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian kerja atau tugas menunjukkan bahwa kesadaran organisasi terhadap pekerjaannya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum efektif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sudah berjalan baik

3. Penguatan fungsi koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat berjalan efektif, dengan mempertimbangkan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih adanya ketidaksamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Koordinasi antara instansi terkait masih belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator dan masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan. Spesialisasi pekerjaan belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi

pekerjaan. Pengkajian ulang kelembagaan di bidang-bidang yang terkait bencana serta peningkatan pemahaman, pembinaan dan sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh.

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut

4.2.1. Secara Akademik

Disarankan kepada peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lanjutan tentang fenomena belum efektif koordinasi ditinjau dari perspektif ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, terutama dikaitkan dengan fakto-faktor lain yang tidak diteliti dalam lokus yang berbeda

4.2.2. Secara Praktis

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka secara praktis peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi agar adanya penguatan fungsi koordinasi yang lebih efektif, supaya dalam penanggulangan bencana daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bekasi dapat dilaksanakan secara efektif .sesuai dengan harapan pemerintah dan

masyarakat, artinya bencana daerah dapat teratasi dengan baik.

2. Di lihat dari kesatuan tindakan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. oleh karena itu disarankan kepada Kepala Badan untuk dapat selama ini kurang melakukan perbaikan bagi pegawai sehingga perlu penjabaran dan rincian tugas masing masing bagian yang selama ini kurang jelas. Dilakukan analisis jabatan untuk dapat memberikan kejelasan pekerjaan menyesuaikan diri tidak bekerja sendiri dan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Pada pembagian kerja atau tugas menunjukkan bahwa kesadaran organisasi terhadap pekerjaannya belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai koordinator dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana, seperti dengan mencegah duplikasi usaha oleh unit organisasi, lalu adanya sinkronisasi

dalam bekerja dan adanya kesepahaman dalam bekerja